

DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM (Study Tentang Lahirnya Kelas Elit Muslim di Indonesia)

Latifatul Khasanah

(hs.latifah@yahoo.com)

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang

Abstract : Education which applied in Indonesia influenced by many factors, for example: government political policy. Government policies ranging from colonial, pre independence day, post independence day until the new orde seemed to ignore Islamic education. This problem causing Islamic education institution have many weakness that have to find a solution. Islamic education institution lack of human resource, management, and fund. Muslims have not been able to optimally actualize Islam transformatively. Islamic education is less attractive to the public. This weakness can be solved due to the struggle of muslims and Islamic figure and the increase of government attention to Islamic education. Thus making various policies and regulations that bring Islamic education and Islamic education institutions increasingly play a role in the implementation of education in general in Indonesia. This can be seen from the number of recitation in hotels, the development of religious music, Muslim Television, Muslim newspaper and many young designer appeared to make a fashion trend in many national and international events.

Keywords : Policy , Islamic Education, Muslim Elite Class

Abstrak : Pendidikan yang diterapkan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kebijakan politik pemerintahan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masa Orde Baru terkesan mengabaikan pendidikan Islam. Masalah-masalah inilah yang mengakibatkan sebuah lembaga pendidikan Islam mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan yang harus dicarikan solusi dan jalan keluar. Kelemahan itu di antaranya rendahnya sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan dana. Karenanya, umat Islam belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya, dipandang belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif; dan lembaga pendidikan Islam kurang diminati oleh masyarakat. Kelemahan-kelemahan ini akhirnya dapat diatasi berkat perjuangan dan kesabaran umat dan tokoh-tokoh Islam, perhatian pemerintah semakin lama semakin besar sehingga melahirkan berbagai kebijakan dan peraturan yang membawa pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam semakin berperan dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum di Indonesia. Selanjutnya kebijakan tersebut banyak melahirkan Kelas Elit Muslim. Misalnya munculnya banyak pengajian pengajian di Hotel berbintang, berkembangnya musik religius, Televisi Muslim, Koran muslim dan berjamurnya desainer-desainer muda muslim dan dibarengi munculnya trend anak muda memakai busana muslim diberbagai event.

Kata Kunci : Kebijakan , Pendidikan Islam, Kelas Elit Muslim

A. Pendahuluan

Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia amat dipengaruhi berbagai hal, di antaranya berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, dan kebudayaan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru tampak tidak menguntungkan pendidikan Islam, bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam. Namun, berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam hingga lahirnya Undang-undang RI Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada masa kolonial Belanda, kebijakan pemerintah tidak memperkenankan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah. Karenanya pendidikan Islam hanya dilaksanakan oleh masyarakat, baik perorangan maupun melalui lembaga atau organisasi Islam dengan pengawasan yang sangat ketat. Hal ini berbeda ketika masa kolonial Jepang yang memberikan keluasaan untuk pengajaran agama Islam di sekolah meskipun guru yang mengajar tidak digaji oleh pemerintah. Bangsa Indonesia telah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Meskipun pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan mereka.

Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, bangsa Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Hal itu terbukti dengan menempatkan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-undang Dasar RI 1945.¹ Pendidikan merupakan upaya merancang masa

¹Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perda-maian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang

depan umat manusia yang dalam konsep dan implementasinya harus memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Konsep pendidikan dapat diibaratkan sebuah pakaian yang tidak dapat diimpor dan diekspor. Ia harus diciptakan sesuai dengan keinginan, ukuran, dan model dari orang yang memakainya sehingga tampak pas dan serasi. Demikian pula dengan konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Ia amat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, kebudayaan dan lain sebagainya. Berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu “diredam” untuk sebuah tujuan ideal yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) BAB II, pasal 3.²

Pada masa Orde lama pendidikan Islam mulai diperjuangkan untuk diadakan pembaruan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan Islam, di antaranya madrasah wajib belajar (MWB). Perbaikan pendidikan Islam berlanjut pada masa Orde Baru yang diawali oleh kebijakan pemerintah dengan penegrian madrasah (MIN, MTsN, dan MAN), hingga lahirnya SKB Tiga Menteri yang me-nyamakan lulusan sekolah dengan madrasah, pendirian MAPK dan lain-lain. Ke-bijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam semakin membaik pada masa orde reformasi dengan munculnya universitas-universitas Islam negeri yang tidak hanya bernaung di bawah Kementerian Agama, tetapi juga di bawah Kementerian Pendidikan Nasional yang memungkinkan pendidikan Islam mendapat perhatian dari berbagai pihak tanpa menonjolkan dikotomi umum dan agama.

B. Kebijakan Politik Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BP7 Pusat, *Undang-Undang Dasar, P4, GBHN*, Jakarta: t.p., 1990, h. 1.

²Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan ke-hidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokusmedia, 2006, h. 5-6.

1. Pemerintahan Orde Lama (Soekarno th 1945-1966)

Di masa awal berdirinya negara 1945-1966, pertentangan antara kepentingan politik dan aliran ideologi nasionalis sekuler dan nasionalis Islam acap kali terjadi dalam memutuskan kebijakan. Keadaan yang demikian berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah yang belum mencerminkan pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan yang terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam sepenuhnya di bawah tanggung jawab Departemen Agama yang dibentuk untuk membidangi masalah-masalah keagamaan. Pendirian Departemen Agama dilatari oleh kebijakan politik umat Islam setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Republik Indonesia baru dibentuk oleh koalisi Muslim dan beberapa partai nasionalis, antara lain Masyumi, Nahdhatul Ulama, PNI, dan PKI. Meskipun selama tahun-tahun peperangan, pihak Muslim menjadi kekuatan organisasi politik yang besar, namun kemudian kekuatan mereka terkalahkan oleh kekuasaan Partai Nasionalis Indonesia yang bercorak nasionalis sekuler.³

Perdebatan-perdebatan antara kelompok Muslim yang beraliran politik dan ideologi yang agamis (Islam) berpandangan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan dan menuntut Islam dijadikan sebagai dasar negara apabila Indonesia merdeka, sedangkan golongan nasional dalam aliran politik dengan ideologi sekulernya menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Ditinjau dari perspektif kehidupan kenegaraan, muara dari keinginan dan upaya pemikir dan aktivis politik Islam adalah menempatkan posisi Islam secara pas dalam kehidupan kenegaraan, yaitu dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Muhammad Natsir selaku tokoh Masyumi merupakan salah seorang artikulator penting dari gagasan ini. Bahkan, sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1930-an, Natsir telah terlibat dalam perdebatan dengan Soekarno tentang hal krusial tersebut.⁴

Gagasan menjadikan Islam sebagai dasar negara kembali mewacana dalam sidang Badan Pelaksana Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Perdebatan itu berakhir tanggal 22 Juni 1945 setelah adanya kompromi dan

³Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 61

⁴Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Ushul Press, 2005), h. 43.

kesepakatan, yaitu kelompok Islam agamis, nasionalis dan kelompok nasionalis sekuler berkaitan dengan dijadikannya Piagam Jakarta sebagai Mukadimah UUD 1945. Namun, pada tanggal 18 Agustus 1945, kesepakatan itu berubah dengan penerimaan rumusan Pancasila tanpa disertai Piagam Jakarta. Perubahan itu diterima oleh kelompok Islam yang berideologi agamis, karena situasi saat itu mengharuskan adanya prioritas pilihan.⁵ Perubahan atas dasar negara tersebut didasarkan pada pertimbangan politis untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, proses perubahannya dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan dasar negara itu menimbulkan pertanyaan umat Islam dan perasaan tidak puas, karena Piagam Jakarta telah disepakati sebelumnya yang mencantumkan syariat Islam sebagai dasar negara sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk meredam keinginan umat Islam setelah Indonesia merdeka, pemerintah menyediakan pembentukan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 sebagai konsensi bagi umat beragama khususnya bagi umat Islam. Departemen ini dibentuk untuk melindungi kebebasan beragama, menjaga keserasian hubungan antara komunitas agama yang berbeda, dan yang utama adalah untuk menangani masalah keagamaan Muslim, seperti pendidikan Islam, perkawinan, haji, dakwah, dan mengelola peradilan agama.⁶ Departemen Agama inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia.

Sejak saat itu Departemen Agama mengelola sepenuhnya pendidikan Agama Islam, meskipun banyak tantangan dari kekutan nasionalis sekuler terutama di lembaga Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) saat sidang-sidang dalam merumuskan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah tahun 1949-1950. Pemerintah belum memosisikan pendidikan Islam

⁵Kalangan nasionalis Islam menilai bahwa bukanlah saat yang tepat untuk memprotes perubahan itu, pada saat bangsa Indonesia dituntut untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang menjadi pertimbangan lain adalah Pidato Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai "hari lahir Pancasila" serta pernyataan janjinya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menekankan bahwa UUD 1945 bersifat sementara. Lihat Firdaus Syam, Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di *Pentas Indonesia Modern*, (Cet. I; Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 48.

⁶Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, bagian ketiga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 340. Lihat pula Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban ...*, h. 61.

terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional.⁷ Tantangan yang demikian tidak terpisahkan dari kondisi politik negara yang belum stabil dengan berbagai kepentingan yang memengaruhinya. Secara politik, pada masa pemerintah Presiden Soekarno terjadi tarik-menarik antarkepentingan dan kekuatan kelompok nasionalis, kelompok agamis, dan kelompok nasionalis sekuler atau komunis dalam merumuskan berbagai kebijakan yang memberi arah ke mana negara dan bangsa ini dibawa. Hal tersebut ternyata sangat menguras waktu dan kurang memberi peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan Islam.⁸ Tiga kekuatan ideologi ini sering kali berbenturan dan saling mangalahkan. Presiden Soekarno adalah tokoh yang menganut ideologi nasionalis yang berbasis keindonesiaan dan kultural. Dalam posisinya itu, ia terkadang dekat dengan kelompok Islam dan terkadang dekat dengan kelompok sekularis komunis.⁹

2. Pemerintahan Orde Baru (Soeharto th 1966 – 1998)

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pergantian system pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto sejak tahun 1966-1998.¹⁰ Di bidang pendidikan di masa Pemerintah Orde Baru bertujuan untuk menekankan pada

⁷Besarnya tantangan tersebut dapat dilihat pada praktik penyelenggaraan pendidikan Islam yang masih sepenuhnya mengajarkan ilmu-lmu agama, juga pada lembaga pendidikan umum belum mewajibkan pengajaran pendidikan agama kecuali dengan persetujuan orang tua murid atau dengan sikap sukarela. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan Belanda yang bersikap “netral” terhadap agama seperti yang dinyatakan dalam pasal 179 ayat (2) Indische Staatsregeling bahwa pengajaran umum adalah netral, yang artinya pengajaran diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Di sekolah menengah umum yang berbahasa Belanda seperti Mulo (Meer hidgebreid Lager Onderwijst) dan AMS (Algemene Midddebare School) pada tahun 1930 diajarkan pula pelajaran agama Islam bagi murid-murid yang berminat dan bersifat sukarela. Lihat Departemen Agama RI, Informasi Kelembagaan Agama Islam, “*Dokumen*”, h. 6.

⁸Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan, h. 7.

⁹Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 14. Menurut Husni Rahim Pengambilan kebijakan saat perumusan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Pada beberapa pasal yang berkaitan dengan pendidikan, tidak dimasukkan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam dalam bentuk Madrasah dan pesantren dianggap belum termasuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 17.

¹⁰Peralihan kekuasaan ini berdasarkan siding MPRS tahun 1968 yang menetapkan Supersemar, sehingga secara hukum ia menjadi sah. Sejak itu, Soeharto sebagai pemegang Supersemar ditetapkan menjadi Presiden RI yang kedua. Kehadiran Orde Baru ini membawa semangat untuk melakukan “koreksi total” yang dianggap menyimpang dari dasar negara yang pernah terjadi di masa pemerintah Presiden Soekarno. Hamlan, *Politik Pendidikan Indonesia*, vol. 10no. 01, Juni 2013 hal 177

“Kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keterampilan, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa.” Namun, dalam kenyataannya tujuan pendidikan yang telah dirumuskan, ditetapkan dan diamanatkan oleh MPRS dan MPR tampaknya belum mewujudkan di masa Orde. Penyebabnya adalah selain dipengaruhi oleh faktor intern, juga dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor intern adalah tidak diikuti oleh sistem pendidikan yang kuat dan tidak didukung oleh manajemen yang baik sehingga pendidikan kurang berjalan secara efektif. Dalam praktiknya, kebijakan pemerintah Orde Baru menerapkan system yang sentralistik sehingga terjadi polarisasi yang seragam (uniformitas). Polarisasi yang sentralistik berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah telah berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan segalanya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sistem ini berimplikasi terhadap pemerintah yang ada di daerah. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah sangat lemah dalam prakarsa dan kreativitas untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapinya.¹¹

Dalam kaitan dengan pendidikan Islam, kebijakan politik pendidikan Islam era pemerintah Orde Baru khususnya di masa awal pemerintahnya belum memerhatikan pengembangan pendidikan Islam bahkan cenderung mengalihkan pembinaan pendidikan Islam oleh Depertemen Agama ke Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti tercermin pada sejumlah kebijakan yang tertuang dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan berkenaan dengan pendidikan Islam.¹² Selanjutnya Kebijakan pemerintah dalam Keppres Nomor 34 tahun 1972

¹¹Hamlan , Politik Pendidikan Islam Dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Di Indonesia, Jurnal Studia Islamika, vol.X, No. 1, 01 Juni, 2013 hal.178

¹²Pada tahun 1972 dan 1974, lahir kebijakan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972. Dalam Keppres 34 tahun 1972 disebutkan pada pasal 1 ayat (2) yaitu “Mengatur standarisasi lembaga pendidikan dan latihan yang meliputi isi dan kualitas palajaran guna disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.” Dalam pasal 1 ayat (4) “Mengatur dan mengawasi izin pendirian sesuatu lembaga pendidikan dan latihan.” Pada pasal 2 juga disebutkan bahwa “Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah

tersebut merupakan salah satu bentuk hegemoni pemerintah di bidang pendidikan, baik dari sisi pengaturan standarisasi kualitas pendidikan untuk kebutuhan pembangunan yang dikehendaki oleh pemerintah, maupun pengaturan dan pengawasan tentang pendirian lembaga pendidikan negeri dan swasta. Bahkan, dengan kebijakan ini pemerintah berkeinginan untuk menjadikan pendidikan satu atap dalam pengelolaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan bidang pendidikan tampaknya menjadi kewenangan otoritatif Pemerintah Orde Baru. Demikian pula halnya dalam Inpres Nomor 15 tahun 1974, pasal 3 dikemukakan bahwa “Tugas dan kewajiban Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembantu Presiden di bidang pendidikan meliputi tanggung jawab fungsional pembinaan pendidikan dan latihan.” Dalam bab III tentang pelaksanaan pembinaan dan latihan pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh.”¹³

3. Pemerintahan Reformasi (tahun 1998-sekarang)

Dalam perkembangan pendidikan Islam terutama pasca pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1998 sampai saat ini yang dikenal sebagai sistem pemerintahan Era Reformasi. Pada masa ini merupakan era baru dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagai koreksi terhadap sistem pemerintahan yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru.¹⁴ Gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa tahun 1998, pada prinsipnya, mengandung empat tuntutan yang hendak diwujudkan, yaitu: 1) demokrasi; 2) kebebasan berpendapat dan berbeda pendapat; 3) keterbukaan; dan 4) otonomi.¹⁵ Keempat prinsip tersebut merupakan reaktualisasi dari nilai-nilai budaya Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi

maupun swasta. Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1972 tentang *Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan*, “Dokumen” Kantor Sekretariat Negara RI, h. 1-2.

¹³Lihat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972, “Dokumen” Sekretariat Negara RI, h. 3-4.

¹⁴Lihat Undang-Undang Otonomi Daerah edisi terbaru, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 4.

¹⁵www.wikipedia.com (Diakses tanggal 23 Juni 2018). Lihat pula H.A. Malik Fadjar, et.al, Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Kelompok Pendidikan dan Penembangan SDM, *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999), hal. 16

Kemerdekaan 1945. Sebagai respons atas keempat tuntutan reformasi tersebut, disusunlah kebijakan pemerintah yang termuat dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Selanjutnya, ia direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.¹⁶ Undang-Undang tentang Otonomi Daerah tersebut telah mendelegasikan bidang pendidikan sebagai salah satu system pemerintahan daerah yang dikenal dengan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan ini merupakan bentuk penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan agar pengelolaan pendidikan menjadi kewenangan daerah sehingga pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya diharapkan lebih cepat, tepat, efisien, dan efektif khususnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah dalam bidang pendidikan.

Dalam praktiknya Pemerintah Era Reformasi telah melakukan perubahan yang signifikan di bidang pendidikan dengan mengemban misi baru reformasi pendidikan dan sumber daya manusia yang bertumpu pada pembangunan bidang pendidikan nasional yang aspiratif, demokratis, dan partisipatif. Sejalan dengan hal itu, terdapat empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah, yaitu: 1) berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan; 2) efisiensi pengelolaan pendidikan; serta 3) relevansi pendidikan; dan 4) pemerataan pelayanan pendidikan.¹⁷ Tujuan dari perubahan system pendidikan nasional di Era Reformasi dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan keinginan itu, dirumuskan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

¹⁶Lihat Undang-Undang Otonomi Daerah edisi terbaru, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 4.

¹⁷Indra Jati Sidi, *Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*, (Makalah) (Bandung: PPS UPI, 2000). Lihat pula E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Aplikasi*, (Cet. III; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 6.

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan ini bertujuan “Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang bermutu sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945, bertekad untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia sebagai suatu masyarakat Pancasila yang beriman dan bertakwa, memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan antarbangsa, maju dan mandiri, cakap dan cerdas, kreatif dan bertanggung jawab, serta berwawasan budaya.¹⁸

Dalam konteks ini, Departemen Agama sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan Islam telah merespons arah kebijakan pembangunan bangsa Indonesia di Era Reformasi. Kebijakan ini dikemukakan oleh Husni Rahim selaku Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam Rakor dengan Komisi IV DPR RI tanggal 26 Juni 2001.¹⁹ Kebijakan yang berisi penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah SWT, dengan memfungsikan segala potensi yang dimiliki seperti akal, hati, dan sarana pengetahuan lainnya akan dapat menghantarkan manusia pada kebenaran yang hakiki, yaitu pada tingkat kesucian batin menuju hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Dalam Al-Qur’an disebutkan.²⁰ Ayat tersebut dapat dijadikan dalil dalam merumuskan arah dan tujuan yang hendak dicapai

¹⁸H.A. Malik Fadjar, , Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Kelompok Pendidikan dan Penembangan SDM, *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999), hal. xv.

¹⁹Dalam rakor tersebut dikemukakan: “Pendidikan agama diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan pribadi, watak dan akhlak mulia peserta didik, serta pada pembentukan sikap dan perilaku berakhlak. Pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia, selain dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, juga oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan serta tempat-tempat ibadah. Pendidikan agama sangat strategis sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dan sangat besar peranannya dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, karena pada hakikatnya manusia yang berkualitas, yaitu manusia beriman dan bertakwa, hanya terwujud melalui penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran agamanya.” Husni Rahim, *Kebijakan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*, (Dokumen Departemen Agama RI, 2001), h. 3.

²⁰Ayat ini menggambarkan tentang manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut fitrah Allah. “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. al-Rûm[30]: 30)

dalam pendidikan nasional yang diharapkan mampu menghantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa secara konsisten sesuai dengan petunjuk ajaran agamanya.²¹ Lembaga pendidikan Islam yang fungsi utamanya memberikan pengajaran agama dan umum kepada peserta didik idealnya dapat memfungsikan dan mengoptimalkan seluruh potensi pendidikan yang dimiliki oleh peserta didik sekaligus dapat mengaktualisasikan visi dan misi pendidikan nasional.

Rumusan visi dan misi pendidikan nasional tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan di bidang Pendidikan nasional tersebut diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga agar memiliki daya saing menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaruan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.²²

²¹Abdul Fatah Jalil menafsirkan ayat ini bahwa manusia itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan menuju jalan yang baik (fitrah) dan manusia dibekali dengan akal, hati, dan alat-alat pengetahuan yang mampu membantu memperoleh hal-hal yang sehat tanpa kecenderungan kepada hawa nafsu dan akan sampai pada tahap hakikat yang sebenarnya. 'Abdul Fattāh Jalīl, *Min Uṣūl al-Tarbawīyyah fī al-Islām* (Kairo: t.p., 1997), h. 51. Imam Al-Ghazālī menafsirkan ayat ini dengan mengemukakan bahwa bekerjanya akal, hati, dan alat-alat pendidikan itu tentunya masih dalam pengertian fitrah yang sampai pada hakikat. Untuk itu, pencapaian hakikat kebenaran hanya bisa ditempuh melalui proses bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain, agar ia dapat berkembang secara maksimal kepada tujuan yang ingin dicapai. Istilah ta'īm dalam pandangan Imam Al-Ghazali adalah pengetahuan yang datang dari Allah Swt melalui ilmu al-mukāsyafah, yaitu ilmu yang langsung diperoleh dari Allah SWT. Lihat Al-Ghazālī, *Ihyā 'Ulūm al-Dīn*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3.

²²Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang *Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*, h. 73.

Dalam konteks ini pendidikan Islam berperan aktif untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut dengan membangun paradigma baru dalam mengembangkan keilmuan Islam di lembaga pendidikan yaitu mengembangkan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Oleh karena itu pendidikan Islam senantiasa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh nilai moral dan agama. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menjadi keharusan untuk kemaslahatan dan kemajuan umat Islam di masa kini dan masa datang. Sebab, tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh semangat agama, dapat dipastikan bahwa umat Islam akan tertinggal dalam peradaban umat manusia di masa depan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam senantiasa melakukan revitalisasi baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi keilmuannya. Revitalisasi lembaga pendidikan Islam dalam konteks ke depan (global) dapat dipahami dari upaya untuk lembaga pendidikan Islam dalam mainstream yakni lebih berperan dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu, lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, lembaga pendidikan harus memberi bekal berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada murid atau mahasiswa dan lulusan secara memadai (*distinctive competence*).²³

Tujuan dari itu adalah agar akses terbuka terhadap pendidikan tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh lulusan lembaga pendidikan ini yang pada akhirnya akan melahirkan ilmuwan yang komit dengan nilai agama (Islam) dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan mendatang (pembangunan masyarakat ke depan).²⁴

C. Lahirnya Kelas Elit Muslim

Istilah Kelas menengah muslim muncul sejak Orde Baru (tahun 1980an), yaitu sebuah ‘lapisan masyarakat baru’ yang disebut sebagai kelas menengah (*middle class*). Kemunculan kelas ini difasilitasi oleh suksesnya pembangunan ekonomi dan transformasi pendidikan sebagai akibat dari program

²³Rahim, Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.hal. 30

²⁴Rahim, Husni, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, hal. 77

modernisasi yang dijalankan pemerintahan Orde Baru. Dampak dari kemakmuran ekonomi dan transformasi pendidikan ini, sejak tahun 1980an, Indonesia kemudian memiliki sejumlah besar tenaga ahli (*skilled man-power*) yang terdiri dari para menejer, para pekerja terlatih, para teknisi, para guru dan dosen yang berdedikasi tinggi, dan jenis-jenis SDM lainnya yang cukup kualified²⁵.

Transformasi di bidang pendidikan berpengaruh luas terhadap bertambahnya kelas menengah terdidik yang siap memasuki berbagai jenis lapangan pekerjaan. "Dengan masing-masing profesi mereka, kelas menengah terdidik ini kemudian menjadi kelompok penting di birokrasi pemerintah dan juga di banyak sektor swasta yang ada".²⁶ Dalam konteks ini, banyak pengamat seperti Hefner²⁷, Kuntowijoyo²⁸, Arief Budiman²⁹, Ramage³⁰ dan yang lainnya, berkesimpulan bahwa kelas sosial ekonomi baru telah muncul secara fenomenal di Indonesia sebagai sebuah kelas menengah. Dalam kelas menengah ini terdapat sejumlah kaum akademisi, kaum cendekiawan, reformis, intelektual, para pengusaha muda, pengacara, tokoh-tokoh politik, aktifis kebudayaan, kaum teknokrat, aktifis LSM, para juru dakwah, publik figur, para presenter, para pengamat ekonomi dan sejenisnya.³¹

²⁵M. Syafi'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia. Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Paramadina. 1995, hal 120

²⁶Mitsuo Nakamura, *The Emergence of Islamizing Middle Class and the Dialectics of Political Islam in the New Order of Indonesia: Preludes to Informations of the ICMI*. A paper presented at Honolulu's seminar on *Islam and the Social Construction of Identities: Comparative Perspective on Southeast Asian Muslim*. 4- 6 August, 1993

²⁷Hefner, Robert W. 1993. *Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesia Middle Class*. *Indonesia*. Number 56 (October), 1993 dan *Islamization and Democratization in Indonesia*. In Hefner, Robert W. and Patricia Horvatic, eds., *Islam in an Era of Nation-States, Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press. 1997a

²⁸Kuntowijoyo. *Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950: Sebuah Pencarian Identitas*, *Prisma* No. 11, 1995, hal. 35-51.

²⁹Arief Budiman, *From Lower to Middle Class: Political Activites Before and After 1988*, In David Bouchier and John Legge, eds., *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, hal . 289-235.

³⁰Ramage, Douglas E, *Politics in Indonesia. Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London and New York: Routledge.1995

³¹Beberapa studi telah dilakukan dalam mengungkap fenomena kelas menengah di Indonesia. Yang paling awal adalah Majalah *PRISMA* terbitan LP3ES, edisi Februari 1984. Majalah ini mengangkat tema kelas menengah dengan topik *Kelas Menengah Baru: Menggapai Harta dan Kuasa*. Farchan Bulkin, Loekman Sutrisno, J.S.C Mackie, John S. Nimpono Soetjipto Wirosardjono dan Hadimulyo mengulas fenomena kelas menengah sebagai produk pembangunan ekonomi Orde Baru dalam majalah itu. Kemudian harian *Kompas* membuat liputan tentang gaya

Yang menarik, di Indonesia, kemunculan kelas ini diikuti pula oleh meningkatnya semangat kembali pada kehidupan agama, kebangkitan kembali kepada semangat keagamaan tahun 1980an dan 1990an adalah fenomena khas kelas menengah di wilayah-wilayah perkotaan, segmen masyarakat yang paling banyak tersentuh oleh pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Fenomena ini berpengaruh luas pada meningkatnya ketaatan beragama pada orang-orang Islam yang sedang menikmati kemakmuran sebagai kelas menengah.³² Kelas menengah Muslim ini muncul dari proses urbanisasi yang terjadi sejak tahun 1960an. Proses industrialisasi dan pembangunan yang sentralistik telah mendorong timbulnya proses urbanisasi kaum santri dari desa-desa ke wilayah-wilayah perkotaan. Di tengah-tengah kultur kehidupan metropolis, mereka dihadapkan pada situasi tarik menarik antara tuntutan menjadi modern di satu sisi tetapi dengan resiko terjangkit alienasi dan dislokasi, dan bagaimana mempertahankan akar-akar kultur santri dengan resiko “kehilangan” modernitas. Hal ini menjadi dilema, kaum santri urban merasa sakit untuk sepenuhnya modern, tetapi juga sakit untuk sepenuhnya meninggalkan tradisionalitas mereka. Menurut Huntington, dalam situasi seperti inilah, “*Islamist symbols, commitment, and beliefs meet these psychological needs.*”³³

Setidaknya ada lima fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia terutama tahun 1980an dan 1990an yang berfungsi sebagai presentasi

hidup kelas menengah tahun 1986. Memasuki tahun 1990an muncul beberapa buku dan tulisan yang mengulas fenomena kelas menengah Indonesia. Misalnya, buku yang disunting Richard Tanter and Kenneth Young (eds). *The Politics of Middle Class Indonesia*, Melbourne: Monash Papers on Southeast Asia, 1990; Howard. W. Dick, “Further Reflections on the Middle Class,” dalam Richard Tanter and Kenneth Young (eds). 1990; Happy Bone Zulkarnain, Faisal Siagian dan Laode Ida (eds.), *Kelas Menengah Digugat*, Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 1993; Majalah *Forum* mengangkat *headline* tentang kelas menengah tahun 1996. Tulisan-tulisan ini membahas sekitar eksistensi, gaya hidup, peranan, pengaruh dan posisi kelas menengah di Indonesia. Nico Daryanto menulis *Kelas Menengah dan Budaya Politik Sipil di Indonesia* (makalah untuk Seminar Proses Demokratisasi di Indonesia diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina 5 Agustus 1989), dan seterusnya. Ricahrd Robison. *The middle class and the bourgeoisie in Indonesia*. In Richard Robison and David S.G. Goodman, eds., *The New Rich in Asia, Mobile Phones, McDonald's and Middle Class Revolution*. London and New York: Routledge 1993, hal. 60

³²Vatikiotis, Michael R.J. 1996. *Political Change in Southeast Asia, Trimming the Banyan Tree*. London and New York: Routledge, 1996, hal 152-153

³³Samuel P Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster, 1996, hal. 116

kultural kelas menengah Muslim. Kelima fenomena tersebut adalah: (1) Gelombang pemakaian kerudung sebagai sebuah penegasan identitas kelas, (2) kemunculan lagu-lagu kasidah modern Bimbo yang khas berselera kelas menengah, (3) pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), (4) penerbitan media Islam dan (5) pengajian elit di tempat-tempat prestisius dan hotel-hotel berbintang. Kelima fenomena itu akan dilihat tidak hanya sekadar bukti telah meningkatnya ekspresi keagamaan atau gejala kebangkitan keagamaan Islam tahun 1980an dan 1990an, tetapi lebih dari itu, dilihat sebagai apa yang disebut Bourdieu sebagai “reproduksi kultural” (*cultural reproduction*) yaitu investasi sosial yang secara generatif (terus-menerus) dilakukan dan secara perlahan kemudian meneguhkan terbentuknya sebuah identitas kelas baru bernama kelas menengah Muslim.

1. Busana Muslimah

Ciri pertama yang menonjol, kehadiran kelas menengah Muslim di Indonesia ditandai oleh munculnya fenomena busana muslimah (kerudung/jilbab) di kalangan wanita Muslim yang muncul sejak awal tahun 1980an. Revolusi Islam Iran yang meletus tahun 1979, secara psikologis telah menaikkan harga diri umat Islam di mata dunia, terutama dihadapan Barat. Setelah sekian lama umat Islam berada dalam posisi marjinal dan merasa tereliminasi secara politik dan kultural di berbagai negara dan bangsa Muslim, revolusi Islam kemudian memberikan harga diri baru (self-esteem), identitas baru dan kebanggaan. Awal 1980an, di Bandung, para mahasiswa Muslim mulai muncul dengan busana tertutup mereka dengan mententeng Al-Qur'an di tangan dan mereka terlihat di bis-bis kota, di jalan raya, di kampus, di mall-mall, tempat-tempat umum bahkan di pusat-pusat hiburan. Dengan bangga mereka mengikuti gaya wanita-wanita Iran yang memakai busana Muslimah kemana-mana (saat itu di Indonesia belum terbiasa).

Terilhami oleh wanita-wanita Iran, busana muslimah di Indonesia kemudian menjadi populer di kalangan pelajar perkotaan. Bermula dari Masjid Salman di Bandung, busana muslimah merebak masuk ke kalangan mahasiswa, pelaku bisnis, artis dan pegawai negeri/birokrat pemerintahan. Sejak awal tahun 1980an, perempuan Muslim Indonesia mulai bangga memakainya sebagaimana

perempuan-perempuan Iran mengenakannya. Mengikuti kemenangan revolusi Islam Iran, fenomena jilbab di Indonesia telah menjadi simbol perlawanan Islam terhadap hegemoni budaya Barat. Sejak 1980an, pengaruh revolusi ini terasa kuat di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Identitas Islam berupa busana Muslimah telah menjadi kebanggaan di kota-kota besar, tersosialisasi secara luas diantara kalangan wanita Muslim dan mahasiswa yang akhirnya kemudian menyentuh kalangan kelas menengah. Ketika masuk pada kalangan menengah, busana muslimah telah bermakna lain, bukan hanya ekspresi kesadaran beragama semata tetapi secara sosial berfungsi sebagai penegasan identitas (*affirmative identity*) dan simbol kebangkitan kelompok.

Busana muslimah berperan efektif dalam proses kesadaran pembentukan kelas karena ia berfungsi sebagai apa yang disebut Bourdieu dengan '*habitus*.' Habitus adalah "sistem pengulangan ekspresi penampilan (disposisi) yang kemudian berkembang menjadi struktur sosial yang berfungsi menstrukturkan struktur baru. Sistem pengulangan itu kemudian menggenerasi menstrukturkan praktek-praktek representasi yang secara obyektif terus berlangsung".³⁴ Habitus Busana muslimah dikenakan terus-terusan, dimana-mana (masjid, sekolah, kampus, ruang kelas, tempat-tempat hiburan, mal-mal, lapangan olah raga dan seterusnya) sehingga setelah berproses dalam jangka waktu yang cukup lama, ia membentuk sebuah kesadaran kelompok.

Disposisi (bahasa penampilan) ditunjukkan melalui proses yang perlahan, bertahap dan terus-menerus. "Tubuh" kata Bourdieu, "secara literal kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk tertentu, menjadi simbol, dimana habitus perlahan-lahan terefleksikan dari cara orang berjalan, berpakaian, berbicara, bergerak dan makan".³⁵ Sebagai prinsip-prinsip generatif yang berulang terus-menerus, habitus kemudian memproduksi dan mereproduksi "*the 'practices' of a class*." Ketika kelompok yang tersadarkan itu adalah kelompok Muslim yang sedang mengalami kemakmuran ekonomi sebagai hasil dari modernisasi

³⁴Pierre Bourdieu, *An Outline of a Theory of Practice*. trans. Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977, 73

³⁵John B.Thompson, "Bourdieu on 'habitus.'" In Patrick Joyce, ed., *Class*. Oxford, New York: Oxford University Press, 1995, hal. 102

pembangunan Orde Baru, busana muslimah kemudian menjadi identitas sebuah kelas baru yaitu kelas menengah Muslim. Individu-individu yang mengenakan busana Muslimah, “*do not know what they are doing that what they do has more meaning than they know*”.³⁶ Dengan membiasakan memakai busana yang khas di kalangan mahasiswa dan kelas menengah, para wanita Muslim, “terus-menerus mengkonstruksi dunia sosial mereka melalui praktik kehidupan sehari-hari dan kemudian mengisinya dengan makna baru”.³⁷ Berbusana Muslimah, secara sosial, lebih dari sekadar menjalankan ajaran agama dan peneguhan identitas, tapi pembentukan sebuah kelas.

2. Kasidah Modern Bimbo

Pada saat pemakaian kerudung/jilbab mulai populer, di sisi lain pada tahun 1980an, hadir juga sebuah ekspresi musik yang melantunkan kasidah modern yang menjadi simbol keberagaman dan kehausan spiritual masyarakat terdidik perkotaan. Jiwa yang gersang masyarakat Muslim perkotaan ini, sejak tahun 1980an disiram oleh teduh dan sejuknya musik kasidah modern dalam bentuk musik pop yang ditampilkan oleh Bimbo. Melalui kasidah modern yang khas kelas menengah ini, grup Bimbo mengenalkan sebuah simbol Islam lain yang memperkuat identitas keagamaan kelas menengah Muslim yang, sebelumnya ditampilkan oleh semaraknya berjilbab. Acil Bimbo mengatakan bahwa-bahwa lagu-lagu kasidah modern tersebut dimaksudkan untuk menyuguhkan selera musik religius masyarakat Islam urban yang tinggal di wilayah-wilayah perkotaan.³⁸ Diterimanya musik kasidah modern Bimbo di kalangan masyarakat kelas menengah kota tahun 1980an ini nampaknya karena mereka mencari “ekspresi estetis religius yang damai, tenang dan menyejukkan”.³⁹ Sebagai alternatif dari kasidah tradisional yang didominasi instrumen-instrumen musik,

³⁶Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron. 1977. *Reproduction in Education, Society, and Culture*. London and Beverly Hills: Sage, 1977, hal. 79

³⁷Keaton, Trica Danielle. 1999. “Muslim Girls and the ‘Other France’: An Examination of Identity Construction.” *Social Identities*. Volume 5, Number 1, 1999, hal.49

³⁸Tatang Sumarsono, *Sajadah panjang Bimbo : 30 tahun perjalanan kelompok musik religious*, Mizan, Jakarta, 1998, hal. 179

³⁹*Ummat*, “Mariana Ramelan. Tahajudku Cuma untuk Keluarga,” No. 16 Thn. 1996, I, 19 Februari, hal. 87-89.

nada dan syair Arab atau kearab-araban, Bimbo menghadirkan sebuah warna musik kasidah baru yang didominasi oleh alat musik modern yaitu gitar, organ, drum dan lain-lain. Alunan kasidah modern Bimbo ini dirasakan oleh kelas menengah Muslim dengan indah mentransformasikan nilai-nilai agama melalui musik pop. Sebagai grup musik yang telah sukses memuaskan kebutuhan ekspresi religius masyarakat urban, Bimbo mendominasi hampir semua penampilan musik religius yang ditampilkan dalam televisi setiap bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri pada tahun 1980an dan 1990an. Bimbo telah memberikan kontribusi besar dalam lanskap seni musik religius di kalangan kelas menengah di Indonesia.

Melalui media musik pop, dimana kata-kata lebih dominan daripada suara musik, kasidah baru ini lebih mampu masuk ke dalam penghayatan rasa pendengar secara mendalam. Di tengah hingar-bingarnya kehidupan modern, degradasi moral, krisis keteladanan, ketidakpastian sosial dan tingginya angka kriminal, masyarakat urban mendambakan figur moral yang dapat meredakan problem-problem sosial yang dihadapi. Dalam kondisi kebangkrutan moral pemimpin dan krisis keteladanan yang akut, kaum Muslim kota mengingat-mengingat lagi “*collective memory*” mereka ketika masa kecil di pedesaan (di surau-surau dan masjid) yang mengagungkan sosok Nabi Muhammad Saw. Bimbo merefleksikan fenomena gejala psikologis ini melalui salah satu lagunya yang menyejukkan yang berjudul “Rindu Rasul.” Dengan demikian, lagu-lagu kasidah tradisional yang umumnya didominasi oleh orkes gambus dan rebana yang liriknya berbahasa Arab sudah tidak lagi *match* dengan selera musik kelas menengah yang sedang mengalami transformasi sosial, intelektual dan ekonomi ini. Musik gambus dan rebana, selama beberapa dekade termarginalisasikan dan dianggap sebagai musik Islam tradisional di pesantren-pesantren dan madrasah. Dalam ketidakhadiran ekspresi estetis kelas menengah inilah, popularitas kasidah Bimbo tahun 1980an dan 1990an bisa difahami.

Jika masjid-masjid hanya menyediakan “tempat penampungan” bagi kelompok kelas menengah yang terdislokasi, musik kasidah Bimbo memberikan sesuatu yang lain: “sejenis musik religius yang tenang dan sunyi, sebuah kemurnian jiwa yang membawa pendengarnya pada sebuah kesadaran yang

damai.⁴⁰ Kelas menengah,” menurut Afrizal Malna, seorang sastrawan, “adalah sebuah kelas dengan orang-orang yang memiliki basis sosial yang pecah. Karenanya, mereka membutuhkan sebuah ruang individu untuk menemukan kedirian mereka sendiri dan itulah yang diberikan oleh lagu-lagu kasidah Bimbo.” Kasidah modern Bimbo, dengan kata lain, memberikan dua hal: kebutuhan psikologis kelompok santri yang memiliki simbol-simbol identitas urban dan kelas menengah urban dengan simbol-simbol identitas keagamaan.

Proses urbanisasi kaum santri tahun 1960an – 1970an ke kota-kota, menyebabkan mereka terpisah dengan akar-akar tradisional mereka. Di wilayah urban yang baru, mereka jauh dari sumber-sumber simbol religius yang dulu bersatu dengan jiwa mereka di pedesaan. Sebagai sebuah kelas menengah baru, mereka membutuhkan simbol-simbol religius baru yang bisa mengikat dan mempertahankan identitas mereka. Ketika Bimbo menyanyikan lirik-lirik lagu religius yang sejuk dan damai melalui musik pop, tanpa nada marah dan bergejolak, kaum santri kota ini menemukan apa yang mereka cari disitu. Bimbo membangun sebuah genre musik modern dengan basis dan identitas basis religius kultural. Genre musik kasidah modern ini memperkuat simbol-simbol pembentukan kelas yang sebelumnya disimbolkan oleh busana Muslimah. Jika busana Muslimah berfungsi sebagai simbol kembalinya kelas menengah pada agama, musik kasidah modern Bimbo memberikan rasa estetis dalam selera musik dari kelas ini.

Dalam perkembangan selanjutnya, prakarsa Bimbo ini kemudian diikuti oleh performan musik religius artistik yang lain yaitu kelompok Kiyai Kangjeng pimpinan budayawan Emha Ainun Nadjib. Emha bersama kelompoknya seniman Yogyakarta, menghidangkan musik religius kreatif dengan menyulap dan mentransformasikan gamelan Jawa menjadi dentingan-dentingan musik bernuansa religius Islami. Kreasi ini ia persembahkan dalam album Kado Muhammad yang di-*release* tahun 1988. Album ini berisi puisi, musik dan *shalawatan*, diiringi komposisi musik model baru yang merupakan gabungan antara gamelan Jawa

⁴⁰*Ummat*, “Mariana Ramelan. Tahajudku Cuma untuk Keluarga,” No. 16 Thn. 1996, I, 19 Februari, hal. 87-89.

seperti demung, saron, gambang, siter, bonang, gender, gong dan lain-lain, dengan unsur-unsur instrumen musik Barat seperti sintesiser, gitar, flute, violin, drum, dan organ. Album Kado Muhammad menuai sukses besar karena dianggap bisa memenuhi selera kreatif masyarakat Muslim kelas menengah dalam bidang musik dan seni religius. Emha bersama krunya kemudian diundang tampil di berbagai kota-kota besar di Indonesia dan beberapa perguruan tinggi ternama untuk menampilkan simfoni kreatifnya. Kemudian, terinspirasi oleh observasinya bahwa masyarakat Muslim di wilayah-wilayah perkotaan sedang diterjang oleh kehausan musik bernuansa religius, dia kemudian menghadirkan album selanjutnya yaitu “Menyorong Rembulan” tahun 1998 juga berisi lantunan *shalawatan*. Observasi Emha tentang hausnya masyarakat kota akan musik religius tidak meleset. Tidak hanya album keduanya mengalami *best seller*, Emha juga menerima 500 undangan pertahun untuk menampilkan *shalawatan* Kiayi Kangjeng. Setiap penampilannya dihadiri oleh ribuan orang.⁴¹ Semaraknya *shalawatan* Kiyai Kangjeng adalah fenomena khas kelas menengah Muslim dimana masyarakat Muslim yang sudah mengalami transformasi ekonomi dan pendidikan di kota-kota menemukan ekspresi musik kasidahnya dalam bentuknya yang modern dan menyejukkan rasa.

3. Pendirian ICMI

Walaupun masih dalam level simbol, kelas menengah Muslim, sejak tahun 1980an, telah menjadi kekuatan penggerak bagi proses Islamisasi yang terjadi hampir di semua level sosial dan politik di Indonesia. Saat Islamisasi sedang berlangsung, kelas menengah tengah tumbuh menjadi kekuatan penting. Ketika kalangan menengah Islam ini sedang mengalami mobilisasi vertikal, pemerintah membuka dirinya untuk mengakomodasi kekuatan yang sedang tumbuh ini. Kelas menengah Muslim pada periode ini mulai memiliki kekuatan memasuki pusat kekuasaan. Pejabat pemerintah dan birokrat kemudian mengalami apa yang disebut dengan “santrinisasi” atau “*ijo royo-royo*,” sebuah istilah yang pernah populer sebagai proses “penghijauan” di lembaga DPR/MPR. Terbawa arus kuat kelompok santri yang semakin terbuka dan bertambah luas secara kuantitas,

⁴¹Harian *Republika* 4 Nopember 1998 dan 21 Februari 1999.

kelompok abangan pun semakin lama semakin terpengaruh mengalami proses santrinisasi. Sejalan dengan proses islamisasi yang terus menguat, “jumlah” mereka kemudian semakin berkurang. Sejak pertengahan tahun 1980an, dominasi kelompok abangan mulai menurun dan hegemoni kaum santri mulai menguat. Lonceng kematian dominasi kaum abangan Jawa dalam birokrasi Orde Baru kemudian “dibunyikan” oleh Presiden Soeharto sendiri –yang sebelumnya dikenal sebagai abangan dan jauh dari tradisi Islam– pada tanggal 6 Desember 1990, ketika ia mendukung dan meresmikan berdirinya organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI),⁴² sebuah organisasi modern yang paling representatif mempresentasikan telah hadirnya sebuah kelas sosial baru di tengah-tengah umat Islam Indonesia yaitu kelas menengah Muslim. Perubahan sosial politik penting sedang terjadi ketika itu. ICMI kemudian tumbuh menjadi kekuatan kelas menengah yang signifikan. Menurut catatan Arief Budiman, banyak anggotanya menjadi anggota parlemen dan menjadi menteri. Koran baru yaitu *Republika* didirikan dan sebuah bank Islam yaitu Bank Muamalat juga berdiri. CIDES, lembaga kelompok akademisi dan para pemikir muda juga dibentuk dan mulai bekerja. Dengan cepat, kelas menengah Muslim ini telah berpengaruh besar dalam dinamika Islam di Indonesia.⁴³ ICMI saat itu tidak hanya sangat berpengaruh, sebagai organisasi kelas menengah pun berkembang cepat dan meluas. Pada kongres keduanya saja di Jakarta, *1.200 delegasi hadir*,

⁴²Pendirian ICMI ini cukup fenomenal. Berbagai respon dan komentar muncul di sekitar pendiriannya. Bagi para sarjana seperti Robert Hefner, Nakamura, Douglas Ramage dan Arief Budiman, kemudian juga para pendukung dan aktifis ICMI yaitu Kuntowijoyo, Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Imaduddin Abdulrahim dan Amien Rais, ICMI adalah simbol kebangkitan politik Islam dan jalan pintu masuk bagi kalangan Islam ketika itu untuk bisa berperan di pusat kekuasaan setelah sekian lama terpinggirkan. Tetapi bagi yang lain, yang dikenal sebagai analis sekuler, seperti Abdurrahman Wahid dan William Liddle, ICMI tidak lain adalah bentuk kooptasi Soeharto atas kelompok Islam yang sedang naik untuk tujuan politiknya yaitu pemilu 1992. Bagi Wahid dan Liddle, ketika Soeharto menjadi presiden lagi untuk periode berikutnya, ICMI akan ditinggalkan begitu saja dan akan kehilangan kekuasaannya (lihat Liddle 1996a; Schwarz 1994). Bagi kelompok ini, ICMI adalah kendaraan untuk kepentingan politik kelompok Muslim “modernis radikal” (yaitu posisi di pemerintahan atau mendirikan negara Islam). Kasus kejatuhan Soeharto kemudian menunjukkan bahwa pandangan sekuler ini tidak terbukti. Setelah kejatuhan Soeharto tahun 1998, ICMI masih tetap berdiri bahkan pengaruhnya menguat di masa-masa awal reformasi dengan terpilihnya Habibie sebagai presiden dan banyak anggotanya menjadi menteri.

⁴³Arief Budiman. 1994. “From Lower to Middle Class: Political Activites Before and After 1988.” In David Bourchier and John Legge, eds., *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, pp. 289-235. Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies Monash University. 1994, hal 232

*mewakili 42.000 anggotanya dari seluruh propinsi di Indonesia. Dari komunitas-komunitas Islam luar negeri juga berpartisipasi. Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie, yang dipandang sebagai menteri favoritnya Soeharto, terpilih menjadi pemimpinnya yang kedua kali. 16 menteri, hampir setengahnya dari anggota kabinet, duduk di jajaran ketua-ketua ICMI dan presiden Soeharto sendiri berperan sebagai Pelindung.*⁴⁴

Bagi kelas menengah di wilayah-wilayah perkotaan, ICMI telah menjadi simbol kebangkitan *political capital* kelompok Islam. Lebih dari itu, ICMI juga telah menjadi simbol identitas Islam modern dimana umat Islam tidak lagi merasa terbelakang dan marjinal. Dewi Fortuna Anwar merasakan betul perubahan citra ini. “Dulu, Islam diasosiasikan dengan keterbelakangan dan kemiskinan, dan kalangan Islam cenderung merasa rendah diri dengan keislaman mereka [tetapi sekarang] Islam tidak lagi dipandang sebagai agamanya orang-orang yang kalah”. Dengan kata lain, melalui ICMI, Islam mempresentasikan dirinya dalam citra yang modern. Salah satu dampaknya adalah tahun 1990an, modernitas ICMI telah memberikan landasan bagi banyak kalangan Islam untuk mulai menunjukkan identitas keislaman mereka yang sebelumnya kurang percaya diri. Fenomena psikologis keagamaan telah muncul dimana para pejabat pemerintah dan para birokrat “berlomba” menunjukkan identitas keislaman mereka. Pada saat kelompok abangan menguasai birokrasi pemerintahan dan militer, menunjukkan identitas keislaman secara terbuka adalah sesuatu yang “tidak mungkin” karena keislaman identik dengan ancaman pada negara dan telah menjadi stigma anti Pancasila. Istilah “satinisasi birokrasi” atau “birokratisasi santri” telah menjadi jargon yang populer untuk menggambarkan hubungan yang membaik antara Islam dan negara. Begitu kuatnya perubahan simbol-simbol hegemoni budaya ketika itu, muncul tren sosial kultural di kalangan elit Indonesia, kelas menengah Muslim di kota-kota besar dan kelompok terpelajar yaitu munculnya perasaan *out of date* jika mereka tidak terlibat dalam diskursus ICMI atau tidak menjadi anggota.

⁴⁴Liddle, R. William. “The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation.” *The Journal of Asian Studies* 55, No. 3 (Agustus), 1996a, hal 613

Liddle ⁴⁵ memperlihatkan keheranannya dan cukup terkejut melihat orang-orang yang tidak memiliki latar belakang keislaman atau sebelumnya tidak simpati kepada perkembangan Islam seperti Wakil Presiden Try Sutrisno (Panglima ABRI 1988 – 1993) mantan Wakil Presiden Sudharmono, yang dalam masa perjuangan revolusi kemerdekaan tahun 1945 -1949 diduga memiliki keterkaitan dengan gerakan sayap kiri (PKI), Ginanjar Kartasasmita (mantan aktifis PNI) dan Jenderal Rudini (mantan Kasad dan Menteri Dalam Negeri), semuanya berpartisipasi dalam pendirian ICMI. Keheranan Liddle belum habis, “banyak aktifis dan intelektual Muslim diluar lingkaran negara juga tercatat diantara 148 pengurus ICMI.” Mereka termasuk KH.AliYafie, Sri Bintang Pamungkas, Imaduddin Abdulrahim, beberapa unsur pimpinan NU (yang memiliki sekitar 30 juta pengikut) dan Amien Rais (Pemimpin Muhammadiyah, organisasi pendidikan terbesar di Indonesia) yang saat itu “memainkan peranan kunci dalam kongres dan terpilih sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI” .⁴⁶ Terlepas dari terjadinya mobilisasi kaum santri, ada juga faktor resiprokal (saling keterpengaruhan) antara pemerintah dan umat Islam. Nurcholis Madjid (1993) mendeskripsikan saling keterpengaruhan ini sebagai “titik temu kondisi-kondisi obyektif dan subyektif.” Kondisi obyektif adalah diterimanya Islam oleh pemerintah dan kondisi subyektif adalah harapan kalangan Islam untuk mendominasi pemerintahan. Dua kondisi ini, menurut Cak Nur, terlihat dari proses penghijauan di DPR/MPR sebagai hasil dari Islamisasi tahun 1990an.

Bagi Cak Nur, Islamisasi yang ekstensif dan kemunculan kelas menengah Muslim tahun 1990an adalah sebagai hasil dari proses panjang hubungan Islam dan pemerintah. Tahun 1950an, dibuat kesepakatan antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Ketika itu disepakati bahwa sekolah-sekolah agama akan mendapat pendidikan umum, dan sebaliknya, sekolah-sekolah umum akan mendapatkan pendidikan agama. Akibatnya, banyak orang tua santri ketika itu

⁴⁵R. William Liddle, *ICMI dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia*, dalam Nasrullah, 1995 hal 613

⁴⁶Ali Fauzi, *The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation*, *The Journal of Asian Studies* 55, No. 3 (Agustus), 1996a, hal. 913-34.

menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum karena mereka tidak memiliki beban psikologis lagi. Sebagai hasilnya, menurut Cak Nur, di tahun 1960an, mereka yang bergelar BA banyak sekali. Di tahun 1970an, jumlah sarjana melimpah. Namun, saat itu mereka masih disibukkan oleh urusan-urusan individunya. Sebagian mereka mencari lapangan kerja dan yang lain menikah. Tahun 1980an, para sarjana Islam ini mulai bergerak keluar komunitas dirinya sehingga ekspresi keislaman tampak di kantor-kantor, di hotel-hotel, birokrasi dan sebagainya. Namun, ini pun baru sebagai fenomena sosial. Baru di tahun 1990an lah, pengaruh dan nuansa politiknya mulai terasa. Dan ini adalah sebuah perkembangan yang bisa dimengerti. Jika perkembangan ini dibendung, kata Cak Nur, akan berbahaya karena akan melawan arus. Soeharto yang sudah sangat faham akan proses pembangunan, cukup bijaksana menangkap arus gelombang ini, makanya ia kemudian mendukung pembentukan ICMI. Soeharto akan merasa aman bersama komunitas Islam yang sedang menguat. Dari perspektif inilah, proses penghijauan atau menguatnya Islam dalam pemerintahan adalah sebuah proses alami dan akan terus terjadi sampai keseimbangan baru terjadi.⁴⁷

Dengan kemunculan kelas ini, posisi politis kalangan Islam pada tahun 1990an telah berubah secara drastis. Mereka memiliki *bargaining position* dan diperhitungkan. Kaum Muslimin, kata Arief Budiman, bergerak “dari gerakan berbasis kelas bawah, sekarang telah mengalami transformasi kepada kelas menengah. Dari gerakan diluar lingkaran kekuasaan, sekarang sedang bergerak dalam struktur negara”.⁴⁸ Dengan kata lain, kelompok Islam yang sebelumnya berada dalam posisi marjinal sekarang telah menjadi gerakan berpengaruh dalam

⁴⁷Lihat, *Rindu Kehidupan Zaman Masyumi*, wawancara Majalah Amanah dengan Nurcholish Madjid 11- 12 Januari 1993. Senada dengan Cak Nur, Dawam Rahardjo (1993: 329) juga menyaksikan “panen raya” kelas menengah santri terdidik terjadi di tahun 1970an: “Meraka pada mulanya memasuki pemerintahan (sebagai pegawai negeri) dan menjadi dosen di perguruan-perguruan tinggi melalui hubungan patronase dengan senior-senior mereka. Sebagian mereka juga memasuki dunia bisnis dan profesional. Dalam proses itu, dikotomi santri-abangan mulai luntur, dalam persepsi maupun dalam realitas sosial. Tahun 1980an, mereka kemudian menduduki posisi-posisi lebih tinggi dalam karir mereka di birokrasi dan menjadi manajer di perusahaan-perusahaan.”

⁴⁸Arief Budiman, *From Lower to Middle Class: Political Activites Before and After 1988*, In David Bouchier and John Legge, eds., *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1994, hal 233

pusat kekuasaan dan sedang menciptakan keseimbangan baru dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik.

4. Penerbitan Islam

Perkembangan Islam tahun 1980an dan 1990an juga diwarnai oleh munculnya beberapa penerbitan atau media cetak Islam yang khas bernuansa kelas menengah baik dari kualitas penampilan maupun bahasa dan wacana yang diusungnya. Diantara yang paling populer adalah *Jurnal Ulumul Qur'an (UQ)*, *Harian Republika*, dan majalah mingguan *Ummat*. Jurnal UQ pertama diluncurkan tahun 1989. Editornya adalah Muslim Dawam Rahardjo, seorang cendekiawan, aktifis LSM dan pendiri ICMI. Duduk sebagai Dewan Redaksi adalah para Muslim modernis seperti Adi Sasono, Quraish Shihab, Sutjipto Wirosardjono, Marwah Daud Ibrahim, Haidar Bagir, Azyumardi Azra, Kuntowijoyo dan Imaduddin Abdulrahim. Orang-orang ini adalah para aktifis ICMI. *Republika* dan *Ummat* juga melibatkan orang-orang seperti Nurcholish Madjid, Quraish Syihab, Amien Rais, Adi Sasono, Din Syamsuddin, Haidar Bagir dan Dawam Rahardjo. Pemimin Redaksi *Republika* mengatakan, jajaran cendekiawan itu dimaksudkan untuk mengangkat tulisan-tulisan yang bermutudangan nafas Islam, pengelolaan yang profesional, dan menempatkan Islam dalam konteksnya yang luas.⁴⁹

Menarik dicatat adalah, selain muncul saat kebangkitan Islam semarak di akhir pemerintahan Orde Baru, penerbitan ini berorientasi Islam, pengelolaan yang modern dan profesional dan mengusung tema-tema Islam liberal, inklusif dan pluralis. Gaya jurnalistiknya adalah bukti jelas dari telah munculnya sebuah lapisan masyarakat terdidik baru yaitu kelas menengah Muslim yang di Indonesia. Ini bisa diidentifikasi selain dari jajaran pengelolanya juga dari *'language of discourse'* yang mengisi tema-tema penerbitan ini. Sebagaimana kemunculan gejala busana Muslimah, kasidah modern Bimbo, berdirinya ICMI, kehadiran media Islam modern ini tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Islam dua dekade terakhir.

⁴⁹*Tempo, Islam Kosmopolitan dalam Berita*. 9 Januari, 1993

Ulumul Qur'an (UQ) adalah jurnal ilmu dan kebudayaan yang diterbitkan oleh LSAF (Lembaga Studi Agama dan Filsafat) binaan Dawam Rahardjo. Jurnal sekualitas UQ adalah jenis media yang lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dawam Rahardjo melaporkan bahwa ratusan orang Islam di berbagai kota dan perguruan tinggi sudah memesan sebelum jurnal itu terbit. Dalam kata pengantarnya untuk edisi perdana, Dawam menjelaskan bahwa penerbitan UQ diinspirasi oleh empat perkembangan modern yang terjadi di dunia Islam: Pertama, kembalinya kepada al-Qur'an dan sunnah. Umat Islam perlu memahami kembalinya kepada al-Qur'an dengan cahaya baru. Umat Islam perlu metode baru untuk memahami dunia yang berubah. Untuk menangkap semangat zaman, umat Islam perlu memiliki paradigma baru untuk memahami ilmu-ilmu al-Qur'an.⁵⁰ Usaha ini telah dirintis oleh para pemikir semisal Fazlur Rahman, Thabathaba'i, Yusuf Ali, Muhammad Asad dsb. Kedua, Islamisasi ilmu pengetahuan. Pionir dari usaha ini adalah Ismail Al-Faruqi. Ide ini paling banyak berpengaruh pada ekonomi, politik, antropologi dan kedokteran. Ketiga adalah aktualisasi ilmu-ilmu Islam tradisional dan modern, yang telah diwariskan oleh para pemikir Islam sebelumnya. Warisan intelektual Islam perlu di reaktualisasi, diapresiasi dan ditemukan kembali dalam konteksnya yang modern, dan dilengkapi dengan perkembangan pengetahuan terakhir.

Harian *Republika* (terbit tahun 1993) dan majalah mingguan Islam populer *Ummat* (terbit tahun 1995) juga hadir sebagai media modern yang ditunggu-tunggu umat Islam. Setelah umat Islam mengalami booming lulusan pendidikan tinggi, selera mereka tentang bacaan pun berubah. Mereka mengharapkan sebuah media yang dapat mewakili selera mereka yang berubah. Dalam konteks inilah jurnal *UQ*, *Republika* dan *Ummat* muncul. Setelah delapan bulan sejak terbit pertamanya tanggal 4 Januari 1993, *Republika* sukses menjual sahamnya total penjualan 1,3 juta saham dengan harga 5.000/saham Detik, 1-7 September 1993). Penjualan saham koran kepada publik seperti ini adalah sebuah fenomena baru dalam sejarah pers di Indonesia. Sebelumnya, kepemilikan saham

⁵⁰Rahardjo, Dawam. 1989. "Assalamu'alaikum." *Ulumul Qur'an* No. 1 (I).

dimonopoli oleh para investor pengusaha dan pemilik koran itu sendiri. Ketiga media ini juga memiliki ciri-ciri umum yang sama. Mereka berusaha mewakili opini sejumlah masyarakat luas yang sudah mengalami transformasi pendidikan dalam komunitas Islam.

Dapat disimpulkan dari media massa kelas menengah Muslim dengan karakteristiknya yang liberal ini adalah transformasi pendidikan selama Orde Baru telah memfasilitasi kebutuhan akan diskursus intelektual baru. Pendidikan massa telah memunculkan suatu lingkungan intelektual baru dan generasi baru terdidik yang kritis dan mendukung nilai-nilai seperti pluralitas, keterbukaan, demokrasi, moderasi dan sebagainya. Semua itu adalah lingkungan yang menandai kehadiran kelas menengah Muslim yang membutuhkan wacana intelektual baru seiring kehadiran mereka yang telah mapan secara ekonomi. Lewat media inilah kelas menengah Muslim menemukan ekspresinya dalam aspek penerbitan, pemikiran dan suguhan Islam yang lain. Belakangan, menyusul penampilan Mizan, muncul penerbit-penerbit modern serupa yang menyuguhkan buku-buku dengan tema-tema keislaman yang khas kelas menengah seperti Penerbit Paramadina, LKiS, Pustaka Pelajar, Pustaka Sufi, Qalam dan yang lainnya.

Dalam bidang organisasi cendekiawan, sebelum dan sesudah ICMI, ada LSAF yang sudah lama bergerak dalam bidang penerbitan jurnal dengan menerbitkan majalah PRISMA. Kemudian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta yang menerbitkan *Jurnal Studia Islamika*. Dalam tubuh NU ada Lakpesdam NU. Belakangan, yang paling kontroversial, Jaringan Islam Liberal (JIL) hadir mengusung gerakan liberalisasi Islam yang bersemangat sekuler. Kelas menengah Muslim semakin meluaskan dan melebarkan kode-kodenya belakangan ini. Sebagai fenomena yang muncul sejak pertengahan Orde Baru, kelas menengah Muslim memang sebuah kelas sosial baru yang belum banyak diperhatikan dan belum ada studi yang mendalam, padahal semakin hari mereka semakin menegaskan kehadiran, kekuatan dan pengaruhnya di Indonesia.

5. Hotel Berbintang: Pengajian Kelas Elit

Selain di bidang musik dan intelektual, ekspresi religius kelas menengah muncul juga secara fenomenal dalam bentuk lain dalam periode yang sama yaitu pengajian elit yang diselenggarakan di tempat-tempat prestisius, mewah. Tren atau fenomena itu adalah semaraknya pengajian kelas elit. Sejak tahun 1980an, tren pengajian yang khas kelas menengah muncul dan menjamur di hotel-hotel berbintang, kantor-kantor mewah, televisi dan tempat-tempat prestisius lainnya. Paramadina merintis pengajian paket dalam bentuk kursus keagamaan dengan bayaran mahal di bertempat di hotel. Yayasan Tazkia Sehati membuka pengajian-pengajian tasawuf di kalangan elit. Sebelumnya, pengajian agama identik dengan sekelompok orang tradisional, diselenggarakan di madrasah-madrasah dan masjid-masjid dengan suasana pedesaan. Jauh dari kesan-kesan elit dan modern. Tetapi sejak tahun-tahun itulah, pengajian agama mulai merambah menjadi pandangan kelas elit.

Sejak tahun 1980an, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan yang lainnya telah dibanjiri oleh gelombang baru kebangkitan agama. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya kelompok-kelompok pengajian kelas elit. Yang hadir adalah mereka dari lapisan sosial kelas menengah. Beberapa pengusaha sukses seperti Abdul Latief, pemilik Pasaraya Mall dan Direktur Sarinah Jaya, dan Ahmad Ganis, Direktur PT. Radiant Utama, bekerjasama dengan Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo dan Fahmi Idris mendirikan klub kajian agama yaitu Paramadina tahun 1986. Peresmianya diselenggarakan di lantai VI Sarinah Jaya. Dalam pertemuan itu ditekankan bahwa sambil pengajian peserta akan “menikmati pemandangan malam Jakarta, menikmati hidangan, mendengarkan dentingan piano dan mendengarkan pembicaraan tentang agama”⁵¹. Sejak itu, Paramadina yang dipimpin Nurcholish Madjid, kemudian dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan kelas menengah, pejabat tinggi pemerintah, pengusaha dan elit sosial lainnya. Walaupun Paramadina menyelenggarakan kursus-kursus seperti pemikiran Islam dan filsafat Islam, tetapi yang paling populer adalah program kajian tasawuf. Menurut Budy Munawar Rahman, Direktur Divisi Pendidikan, “itu karena para anggota pengajian tidak hanya

⁵¹Majalah *Tempo*, *Islam Kosmopolitan dalam Berita*, 3 Januari, 1987.

mencari pengetahuan agama tetapi ingin melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.”

Tanggal 15 September 1997, di Kafe News Setia Budi Kuningan Jakarta, sekitar 400 orang menghadiri seminar tentang “Kebangkitan Spiritualitas Baru” yang mendiskusikan novelnya James Redfield yang terkenal yang berjudul “*The Celestine Prophecy*”. Pembicaranya adalah Karlina Leksono, sosiolog Ignas Kleden dan seorang artis Oppie Andarista. Pada saat yang sama, di Plaza Bapindo Jalan Jendral Sudirman, diselenggarakan seminar tentang “Relevansi Kehidupan Tasawuf dalam Kehidupan Modern.” Seminar diselenggarakan Keluarga Pengajian Sehati, Adyanti B.N. Rachmadi, anak mantan wakil Presiden, Sudharmono. Sekitar 500 orang hadir. Pembicaranya orang-orang terkenal dengan latar belakang bervariasi seperti Emha Ainun Nadjib, Djalaludin Rahmat, dan Said Agil Munawar, tokoh NU. Dalam pertemuan itu, Sudharmono meresmikan “Pusat Kajian Tasawuf.” Seminar itu diselenggarakan di kawasan elit segitiga emas Jakarta.⁵²

Januari 1999, 50 orang eksekutif dari berbagai perusahaan turut serta dalam program yang disebut “Pesantren Eksekutif” diselenggarakan di Giri Gahana Golf & Resort di Jatinangor, Bandung. Selama tiga hari mereka berusaha membersihkan hatinya dalam acara itu untuk masa depan hidup yang lebih baik. Acara ini diselenggarakan oleh PT. Bimantara Citra, perusahaan milik Bambang Triatmodjo, anak Presiden Soeharto. Program ini diselenggarakan setiap bulan ramadhan selama tiga tahun. Setiap peserta membayar Rp. 350.000 selama tiga hari. Tahun 1999, lebih dari 110 eksekutif yang mendaftar tetapi hanya 50 orang yang diterima karena persoalan kapasitas akomodasi hotel. Program yang sama juga diselenggarakan di beberapa hotel di Jakarta seperti Hotel Hilton, Senayan selama tiga hari 8 – 10 Januari 1999. Disini, setiap eksekutif harus membayar biaya pengajian dengan pendaftaran sebesar Rp. 950.000 selama tiga hari.⁵³ Bentuk-bentuk pengajian seperti itu masih banyak lagi dan semakin menjamur di kota-kota besar di Indonesia sejak tahun 1980an seiring dengan

⁵²*Ummat, Mutiara Tasawuf di Hutan Beton*, No. 9 Thn. III, 15 September/13 Jumadil Awal 1418H, 1997

⁵³Majalah Gatra, 23 Januari 1999.

proses islamisasi yang semakin ekstensif. Bila kini, gemanya tidak terdengar lagi dan kurang gegap gempita karena sudah menjadi fenomena umum, sudah keluar dari sekat-sekat sosial kelas menengah. Pengajian sudah menjadi fenomena semua kalangan.

6. Ibadah Umrah dan Haji: Gaya Hidup Muslim Kekinian

Ibadah haji dan umroh kini tidak lagi jadi hal yang sulit terwujud bagi sebagian masyarakat Muslim kekinian. Bahkan, animo untuk melaksanakan dua ibadah ini semakin meninggi dari tahun ke tahun dan menjadi trend. Permintaan yang sangat tinggi untuk beribadah haji di Indonesia, membuat pemerintah agak sedikit kewalahan, dan menjadikan antrian yang sangat panjang. Misalnya di Jawa Timur, jika seseorang yang ingin beribadah haji pada tahun 2010 maka dia baru akan berangkat haji pada tahun 2022.⁵⁴ artinya dia harus menunggu 12 tahun untuk bisa berangkat beribadah haji. Hal inilah yang membuat para KBIH dan para tour and travel berlomba lomba untuk menawarkan ibadah umrah. Mulai dari yang murah sampai yang mahal. Mulai dari tawaran untuk yang paket ekonomis maupun paket yang eksekutif, mulai dari paket 7 hari sampai yang paket 40 hari.

Umrah Haji sudah menjadi bagian dari Sebagai Gaya Hidup masyarakat muslim. Dengan penuh kemudahan dan fasilitas, baik itu pejabat pemerintah, tokoh agama, kalangan selebritis, pengusaha maupun mereka yang berasal dari kalangan awam. Mengunjungi Baitullah (Rumah Allah) bagi mereka sangat mudah dan ringan layaknya mengunjungi rumah kawan, kenalan atau kerabat di luar desa atau di luar kota. Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang dimiliki sehingga mereka mampu haji atau umrah setiap tahunnya. Bahkan juga tidak mengherankan ada yang mampu beberapa kali melaksanakan umrah Plus dalam setahun. Hal ini merupakan Fenomena munculnya kelas menengah elit muslim. Fenomena Umrah Haji ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan semangat keislaman dalam beribadah & beramal menjalankan Umrah Haji di kalangan umat Islam.

D. Penutup

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Siti Nawarotil Farichah, saat penulis bertemu di kementerian agama untuk mengurus pendaftaran haji, 10 Februari 2018

Pada akhirnya perbincangan mengenai kelas menengah Muslim di Indonesia sendiri merupakan pembahasan kebangkitan masyarakat dalam beradaptasi di iklim modernisme seraya memegang prinsip-prinsip ortodoks agama. Kelas menengah Muslim di Indonesia merupakan perwujudan sebuah masyarakat yang ingin menjadi pemain utama dalam sebuah negara dengan memegang kendali akar-akar kelasnya. Hal inilah yang menjadikan kelas menengah Muslim kemudian berperan penting dalam agen perubahan di Indonesia hingga kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan
- _____, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Al-Qur'an terjemahan Departemen Agama RI
- 'Abdul Fattāh Jalīl, *Min Uṣūl al-Tarbawīyyah fī al-Islām* (Kairo: t.p., 1997)
- Al-Ghazālī, *Ihyā 'Ulūm al-Dīn*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.)
- Ali Fauzi, *The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation*, *The Journal of Asian Studies* 55, No. 3 (Agustus), 1996a
- Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Ushul Press, 2005)
- Budiman Arief, *From Lower to Middle Class: Political Activites Before and After 1988*, In David Bouchier and John Legge, eds., *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*,
- BP7 Pusat, *Undang-Undang Dasar, P4, GBHN*, Jakarta: t.p., 1990
- Departemen Agama RI, Informasi Kelembagaan Agama Islam, "Dokumen"
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Aplikasi*, (Cet. III; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003)
- Hamlan, *Politik Pendidikan Islam Dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Di Indonesia*, *Jurnal Studia Islamika*, vol.X, No. 1, 01 Juni, 2013
- H.A. Malik Fadjar, et.al, *Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Kelompok Pendidikan dan Penembangan SDM, Platform Reformasi*

Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1999)

Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005)

_____, *Kebijakan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*, (Dokumen Departemen Agama RI, 2001)

Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokusmedia, 2006

Sunanto Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)

Syam Firdaus, Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di *Pentas Indonesia Modern*, (Cet. I; Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 48.

Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, bagian ketiga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1972 tentang *Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan*, “Dokumen” Kantor Sekretariat Negara RI

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972, “Dokumen” Sekretariat Negara RI.

www.wikipedia.com (Diakses tanggal 23 Juni 2018)

Indra Jati Sidi, *Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*, (Makalah) (Bandung: PPS UPI, 2000).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang *Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*

M. Syafi’I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia. Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Paramadina. 1995

Mitsuo Nakamura, *The Emergence of Islamizing Middle Class and the Dialectics of Political Islam in the New Order of Indonesia: Preludes to Informations of the ICMI*. A paper presented at Honolulu's seminar on *Islam and the Social Construction of Identities: Comparative Perspective on Southeast Asian Muslim*. 4- 6 August, 1993

Hefner, Robert W. 1993. *Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesia Middle Class*. *Indonesia*. Number 56 (October), 1993 dan *Islamization and Democratization in Indonesia*. In Hefner, Robert W. and Patricia Horvatic, eds., *Islam in an Era of Nation-States, Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press. 1997a

Kuntowijoyo. *Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950: Sebuah Pencarian Identitas*, *Prisma* No. 11, 1995, hal. 35-51.

Ramage, Douglas E, *Politics in Indonesia. Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London and New York: Routledge.1995

Nico Daryanto, *Kelas Menengah dan Budaya Politik Sipil di Indonesia* (makalah untuk Seminar Proses Demokratisasi di Indonesia diselenggarakan oleh Yayasan Paramadina 5 Agustus 1989),

Ricahrd Robison. *The middle class and the bourgeoisie in Indonesia*. In Richard Robison and David S.G. Goodman, eds., *The New Rich in Asia, Mobile Phones, McDonald's and Middle Class Revolution*. London and New York: Routledge1993

Samuel P Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster, 199

Pierre Bourdieu, *An Outline of a Theory of Practice*. trans. Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press,1977

John B.Thompson, "Bourdieu on 'habitus.'" In Patrick Joyce, ed., *Class*. Oxford, New York: Oxford University Press, 1995

Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron. 1977. *Reproduction in Education, Society, and Culture*. London and Beverly Hills: Sage, 1977

- Keaton, Trica Danielle. 1999. "Muslim Girls and the 'Other France': An Examination of Identity Construction." *Social Identities*. Volume 5, Number 1, 1999
- Ummat*, "Mariana Ramelan. Tahajudku Cuma untuk Keluarga," No. 16 Thn. 1996, I, 19 Februari
- Harian *Republika* 4 Nopember 1998 dan 21 Februari 1999
- Arief Budiman. 1994. "From Lower to Middle Class: Political Activites Before and After 1988." In David Bouchier and John Legge, eds., *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, pp. 289-235. Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies Monash University. 1994,
- Liddle, R. William. "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation." *The Journal of Asian Studies* 55, No. 3 (Agustus), 1996a
- R. William Liddle, *ICMI dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia*, dalam Nasrullah, 1995
- Tatang Sumarsono, *Sajadah panjang Bimbo : 30 tahun perjalanan kelompok musik religious*, Mizan, Jakarta, 1998
- Tempo*, *Islam Kosmopolitan dalam Berita*. 9 Januari, 1993
- Rahardjo, Dawam. 1989. "Assalamu'alaikum." *Ulumul Qur'an* No. 1 (I). Majalah *Tempo*, *Islam Kosmopolitan dalam Berita*, 3 Januari, 1987.
- Ummat*, *Mutiara Tasawuf di Hutan Beton*, No. 9 Thn. III, 15 September/13 Jumadil Awal 1418H, 1997
- Undang-Undang Otonomi Daerah edisi terbaru, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Majalah *Gatra*, 23 Januari 1999.
- Wawancara dengan Ibu Siti Nawarotil Farichah, saat penulis bertemu di kementrian agama untuk mengurus pendaftaran haji, 10 Februari 2018.